

Judul : DPR tuan rumah sidang AIPA ke-33 di Lombok
Tanggal : Senin, 03 September 2012
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

DPR Tuan Rumah Sidang AIPA ke 33 di Lombok

Sengketa di perairan Laut China Selatan menjadi isu yang sensitif bagi ASEAN. Tiongkok dan lima negara ASEAN, yakni Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia, sama-sama mengklaim memiliki hak atas kawasan perairan itu. Masing-masing negara meningkatkan anggaran pertahanan bahkan tak segan menunjukkan kekuatan militer dengan berpatroli di kawasan perairan Laut China Selatan yang diduga mengandung sumber minyak dan gas dalam jumlah besar.

Ketegangan yang meningkat di antara keenam negara yang bersengketa semakin diperparah dengan ketiadaan konsensus atau resolusi terkait masalah di perairan Laut China Selatan.

Untuk pertama kalinya dalam 45 tahun, forum pertemuan tingkat menteri Luar Negeri ASEAN Tahun 2012 yang berlangsung di Kamboja, tak menghasilkan kesepakatan mengenai isu yang telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan negara-negara di ASEAN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kecewa dengan kegagalan ASEAN mencapai kesepakatan mengenai sengketa Laut China Selatan. Apalagi hal itu terjadi justru di saat Indonesia dipercaya menjadi ketua ASEAN.

Menurut SBY, Indonesia akan terus berperan aktif melakukan diplomasi dan mencari solusi yang dapat menciptakan perdamaian kawasan, mengingat sengketa Laut China Selatan telah menimbulkan ketegangan di antara sesama negara anggota.



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, Surahman Hidayat

DOK. PEMBERITAAN

Hal inilah yang menjadi salah satu konsen DPR RI dalam penyelenggaraan Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-33, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mulai 16 sampai 22 September 2012.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Surahman Hidayat mengatakan beberapa isu menarik bahkan cukup up to date dengan perkembangan ASEAN dewasa ini, seperti isu Laut China Selatan, akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA di Lombok

"Seperti diketahui, pertemuan ASEAN di Kamboja gagal menuju kata sepakat karena isu Laut China Selatan. Di tengah kebutuhan tersebut, Indonesia perlu tampil sebagai figur pemersatu sikap di kawasan. Indonesia perlu hadir dengan menawarkan sikap dasar, titik kesamaan dalam konteks isu tersebut," kata Surahman, di Jakarta, Jumat (31/8).

Dia mengungkapkan DPR RI akan mencoba menawarkan sejumlah alternatif yang dapat menjadi pelengkap preventive diplomacy yang dijalankan Indonesia. Beberapa alternatif yang akan ditawarkan, antara lain seruan moral untuk menahan diri dari aksi-aksi kekerasan dan militer.

Selain itu, DPR menilai perlunya pembentukan AIPA Eminent Persons Group (grup tokoh-tokoh penting) yang berasal dari ketokohan dan reputasi yang bebas dari pengaruh jabatan, maupun kepentingan.

"Grup ini dapat berdiskusi, tukar pikiran dengan jernih dan bebas kepentingan sehingga dapat menjadi wadah baru yang dapat memecah kebuntuan politik kawasan," paparnya.

Dalam konteks ini, lanjutnya, Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan berbagai negara yang terkait sengketa itu, da-

pat memainkan peran penting untuk meredakan ketegangan antara keenam negara, meskipun upaya diplomasi yang telah dilakukan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Marty Kartalagawa, dengan mengunjungi negara-negara anggota ASEAN yang bersengketa belum menunjukkan hasil.

"Parlemen Indonesia dapat berupaya memainkan peran dalam forum AIPA untuk menawarkan alternatif dan mencari solusi terkait masalah Laut China Selatan, mengingat posisi Indonesia yang netral dan memiliki hubungan baik dengan negara-negara yang bersengketa," kata Surahman.

Mewujudkan Komitmen
Surahman menjelaskan, masalah Laut China Selatan akan menjadi isu yang dibahas Komite Politik pada Sidang Umum AIPA ke-33. Agenda Sidang Umum AIPA ditetapkan dalam enam sesi, yakni Komite



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Politik, Komite Ekonomi, Komite Sosial, Komite Organisasi, Dialog dengan Observer dan juga Women AIPA.

Dia mengungkapkan, selain membahas isu sengketa Laut Cina Selatan, Sidang Umum AIPA kali ini juga akan membahas hal-hal yang perlu dilakukan oleh parlemen se-ASEAN untuk mewujudkan komitmen regional pembentukan Komunitas Asean 2015.

Itu sebabnya untuk pertama kalinya Sidang Umum AIPA mengangkat tema besar "Strengthening the Parliamentary Roles Towards Asean Community 2015". Tema tersebut didasarkan pada perhatian DPR RI mengenai peran dan apa yang bisa parlemen ASEAN lakukan untuk berkontribusi terhadap perkembangan berbagai isu di ASEAN.

Di bidang politik, isu yang akan dibahas adalah mengenai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terkait ASEAN Community dan isu Laut China Selatan. Adapun isu Rohingya tidak dibahas secara spesifik, karena memang dalam pertemuan Komite Eksekutif Juli lalu di Yogyakarta, hal tersebut tidak diangkat sebagai agenda Sidang Umum ke-33 oleh para delegasi yang hadir.

"Namun tidak tertutup kemungkinan isu soal Rohingya dibicarakan secara bilateral dengan Parlemen Myanmar yang telah mengkonfirmasi bakal hadir pada sidang ini," kata Surahman.

Di Bidang ekonomi, pembahasan akan berfokus pada upaya pengurangan kemiskinan, kerjasama dalam pemberantasan

pencucian uang, pemberdayaan UKM dan juga Green Economy.

Di Bidang Sosial, isu yang akan dibahas tentang kesadaran publik terhadap upaya penanggulangan bencana dan juga mengenai Low Carbon. Beberapa isu lainnya seperti peningkatan SDM dan kerjasama multilateral dalam isu Laut China Selatan akan dibahas bersama dalam dialog dengan Parlemen Negara Observer. Surahman menambahkan, terkait Women AIPA, isu-isu spesifik mengenai perempuan seperti pemberdayaan perempuan di pedesaan akan didiskusikan secara mendalam dalam forum ini.

Dalam Sidang Umum AIPA kali ini, lanjutnya, DPR menawarkan kerja-kerja konkret dalam resolusi-resolusi AIPA. Kerja konkret ini tentunya untuk mendukung terwujudnya mimpi Komunitas ASEAN 2015.

Seperti keinginan untuk menggapai dukungan politik untuk pembiayaan bagi UKM, di bidang Green Economy perlu mewujudkan sistem ekonomi yang riil memperhatikan lingkungan dan mendukung konsep tersebut melalui legislasi-legislasi yang pro green economy.

Anggota AIPA saat ini terdiri dari 10 parlemen negara. Sejak September 2011, Presiden AIPA dijabat Ketua DPR RI Marzuki Alie. Hingga saat ini, tercatat 291 peserta akan hadir dari 10 negara anggota AIPA, 9 (sembilan) Parlemen Negara Observer dan lima tamu tuan rumah, 4 (empat) Ketua Parlemen dari Negara anggota AIPA telah mengkonfirmasi akan hadir yakni dari Brunei Darus-

salam, Malaysia, Singapura dan Thailand. Sementara 1 (satu) Wakil Ketua Parlemen yakni dari Vietnam akan hadir, sedangkan dari Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina telah siap mengirim delegasinya.

Presiden AIPA yang juga Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan Lombok dipilih sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33 merupakan bagian dari promosi potensi daerah di Indonesia. "Kita harus memperkenalkan kepada berbagai negara bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan Bali. Ada banyak daerah potensial seperti Lombok yang dapat diperkenalkan dan dipercaya untuk melaksanakan kegiatan internasional," kata Marzuki saat mengecek kesiapan Lombok menjadi tuan rumah penyelenggara Sidang Umum AIPA ke-33, belum lama ini. Dia mengungkapkan, dari berbagai perjalanan ke berbagai negara, ia selalu menyampaikan potensi besar Indonesia, termasuk di bidang pariwisata yang juga ditujukan kepada para pejabat dari Tiongkok dan negara lainnya di Asia maupun Afrika dan lain sebagainya.

Tiongkok merupakan negara yang menjadi target kunjungan pariwisata ke Indonesia, karena berpenduduk 1,3 miliar jiwa. Jika satu persen saja yang bepergian ke Indonesia, maka ada tambahan satu juta wisatawan. Menurut dia, Lombok memiliki potensi alam dan budaya yang tak kalah indah engan Bali. Terkait dengan itu, perhelatan Sidang Umum AIPA nantinya dapat menjadi promosi pariwisata yang sangat baik untuk membawa banyak wisatawan datang ke Lombok.

[Adv/SP/J-9]